

TAK TERURUS: Belasan motor dinas yang tak terawat di basement atau parkir bawah tanah gedung DPRD Badung. Bagian Aset Pemkab Badung menunggu proses lelang.

Belasan Motor Pelat Merah Mangkrak

MANGUPURA - Untuk merawat dan mengurus aset bergerak seperti motor, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung kurang becus. Buktinya, belasan sepeda motor berbagai jenis dibiarkan mangkrak tak terawat di basement atau parkir bawah tanah gedung DPRD Badung. Meski tergolong motor pabrikan tahun jadul, belasan motor ini seجاتinya masih laik pakai. Kondisi mesin dan bodi motor terlihat masih mulus. Sayangnya, karena tidak terawat

motor menjadi kelihatan rusak, berdebu dan tampak sangat kotor. Kabag Aset Pemkab Badung I Wayan Puja saat dikonfirmasi ogah menjelaskan. Mantan Camat Kuta Selatan itu tidak mau menjelaskan lelang kendaraan operasional di lingkungan pemkab Badung, salah satunya yang ada di sekretariat dewan. "Datanya dipegang staf," jelasnya melalui pesan singkat kemarin (26/10).

Di sisi lain, Sekretaris DPRD (Se-

kwan) Badung Made Wira Dharmajaya membenarkan belasan motor uzur di basement. Tapi, dia membantah bila ada unsur kesengajaan. Katanya kendaraan roda dua lama tak terpakai karena akan dihapuskan. "Sekarang sedang menunggu proses lelang di Bagian Aset Sekkab Badung. Bagian Aset yang memproses pelelangan," papar Wira.

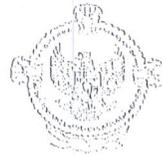
Ditanya jumlah kendaraan operasional yang akan dilelang, Wira tidak memegang data. "Saya tidak hafal. Data

saya lupa. Mohon maaf saya sedang tidak enak badan," jelasnya.

Pantauan koran ini, merek motor yang terbengkalai antara lain motor bebek Astrea Grand, dan Supra. Selain itu ada juga GL Pro, Mega Pro. Motor disebut-sebut adalah kendaraan operasional staf sekretariat dewan. Secara fisik ada nomor polisi (nopol) yang sudah dalam keadaan mati. Tapi ada juga yang masih berlaku hingga November nanti. (san/djo)

Edisi : Selasa, 27 Oktober 2015

Hal. : 24



KIR KARANGASEM

Target Terancam Meleset

AMLAPURA - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR), Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran Karangasem, pesimistis bisa memenuhi target retribusi tahun ini. Kepala UPT KIR, I Gede Kartika Wijaya berdalih karena minimnya pemilik kendaraan di Karangasem melakukan KIR. "Bisa karena kendaraannya jarang keluar, jadinya malas KIR," ujar Kartika Wijaya, seraya mengakui memang targetnya sering meleset.

Untuk merangsang pemilik kendaraan melakukan KIR, pihaknya mengaku bakal melakukan komunikasi dengan instansi terkait. Misalnya, melakukan razia kendaraan. Bagi kendaraan yang kecapatan tidak KIR, akan langsung "dipaksa" melakukan pengujian kendaraan. "Mungkin dengan cara seperti itu, akan bisa mencapai target retribusi," tandas pejabat asal Desa Selumbang, Kecamatan Manggis, itu, ditemui Senin (26/10).

Data yang diterima koran ini hingga September, retribusi yang masuk tercatat sebesar Rp 170.721.600. Sedangkan targetnya tahun ini sebesar Rp 247 juta. Untuk mencapai target itu, sisa waktu tiga bulan (Oktober, November, Desember) harus bisa mengejar pemasukan Rp 76.278.400. Melihat pemasukan per bulannya, rata-rata tak lebih dari Rp 20 juta per bulan. "Makanya, saya kira tidak bisa capai target," tegasnya, didampingi Penguji, Komang Suteja.

Berdasarkan data tiga tahun terakhir, retribusi KIR tak pernah tembus Rp 300 juta per tahun. Misalnya, tahun 2012 lalu, pemasukan sebesar Rp 209 juta. Pendapatan itu, naik pada tahun 2014, mencapai Rp 266 juta. Namun, turun lagi pada tahun berikutnya, menjadi Rp 242 juta. Setiap hari, Suteja menyebutkan ada sekitar 30 kendaraan masuk melakukan pengujian kendaraan bermotor. Jumlah itu, dianggap sedikit. Padahal, ditegaskannya, KIR itu sangat penting. Dengan pengujian yang dilakukan setiap enam bulan itu, pemilik kendaraan bisa mengetahui kondisi kendaraannya, sehingga layak muat barang atau pun orang. "Dengan melakukan pengujian kendaraan secara berkala, bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan," tandas Suteja. (wan/rid)

Edisi : Selasa, 27 Oktober 2015

Hal. : 22



Tim 9 Sulinggih Bahas Teluk Benoa

DENPASAR - Menyikapi adanya isu sensitif terkait rencana reklamasi Teluk Benoa, Pesamuhan Sulinggih yang digelar sejak 23-25 Oktober 2015 di Jakarta akhirnya menyepakati untuk membentuk Tim Sembilan. Tim ini terdiri dari sembilan sulinggih yang membahas soal isu tersebut.

Ketua Sabha Walaka PHDI Pusat Putu Wirata Dwikora, menyatakan bahwa alasan dibentuknya Tim Sembilan Sulinggih pada Pasamuhan Sabha Pandita serangkaian Mahasabha PHDI Pusat itu, untuk mengkaji dan mendalami terkait kawasan suci Teluk Benoa secara komprehensif. Dijelakan, berdasarkan kajian sebelumnya, yang menyatakan bahwa kawasan Teluk Benoa terdapat puluhan kawasan suci seperti Kelan, Jimbaran, Pulau Pudut, Sakenan dan sebagainya, juga dengan merujuk dari hasil kajian yang dilakukan oleh Sugi B. Lanus (Seorang Peneliti Sastra Bali Kuno), ditemukan bahwa di kawasan Suci Teluk Benoa



DOK. RADAR BALI

juga ditemukan Pura Dalem Segara yang diduga sudah tenggelam dan ada di bawah laut ratusan tahun. "Atas dasar itu, kemudian disepakati untuk membentuk Tim Sembilan sulinggih yang nantinya bertugas untuk mengkaji dan mendalami kawasan suci Teluk Benoa secara komprehensif," tandasnya

Lebih lanjut, ketua Bali Corruption Watch (BCW), ini menambahkan, dengan sudah diaturnya kawasan suci Teluk Benoa baik di dalam Bhisama PHDI No.11 Tahun 1994 dan Perda RTRWP No.16 Tahun 2009, baik dari sisi terminologi maupun kosmologi umat Hindu di Bali, para pandita menyatakan jika kajian tersebut dinilai sudah bagus. "Namun karena menyangkut hal sensitif, maka kemudian disepakati untuk memperdalam lagi kajian. Dan bukan menyatakan untuk menyetujui, karena dalam kongres sendiri memang tidak ada pembahasan khusus soal revitalisasi Teluk Benoa," jelasnya. (pra/yes)

Edisi : Selasa, 27 Oktober 2015

Hal. : 1